

Temuan Audit Dalam Karakteristik Kepala Daerah, Karakteristik Daerah, Dan Kinerja Keuangan

Maya Al Zahra¹, Nina Yusnita Yamin², Muhammad Ilham Pakawaru³, Sugianto⁴

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tadulako

E-Mail: mayaalzahraaaa@gmail.com*, nyusnita.untad@gmail.com, pakawaruilham4@gmail.com, sugianto.untad.ac.id

Abstract

The complexity and diversity of accountability issues in local financial management, as indicated by audit results, often point to violations of the law and weaknesses in the internal control framework. The purpose of this study is to examine the impact of regional head characteristics, regional characteristics, and financial performance on audit findings. Budget realization reports, balance sheets, and audit findings of local governments in Central Sulawesi Province for the period 2018-2023 are the data observed in this study. Data analysis was carried out with the Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM PLS) analysis tool with the WarpPLS version 7.0 application. The results of this study indicate that audit findings are significantly influenced by regional characteristics, regional head characteristics, and financial performance. This study suggests that to reduce audit findings, local governments need to create a strong and integrated internal control system. This requires implementing clear financial management practices as well as increasing the capacity of human resources to help understand and apply appropriate control principles.

Keywords: audit findings, characteristic district, characteristics of district head, controlling, financial worker

Abstrak

Kerumitan dan keragaman masalah akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti yang ditunjukkan oleh hasil audit, sering kali menunjukkan adanya pelanggaran hukum dan kelemahan dalam kerangka pengendalian internal. Maksud dari studi ini ialah guna menguji dampak karakteristik kepala daerah, karakteristik daerah, dan kinerja keuangan terhadap temuan audit. Laporan realisasi anggaran, neraca, dan temuan audit pemerintah daerah pada Provinsi Sulawesi Tengah tahun periode 2018-2023 menjadi data amatan pada studi ini. Analisis data dilaksanakan dengan alat analisis Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM PLS) dengan aplikasi WarpPLS versi 7.0. Perolehan studi ini mengindikasikan bahwasanya temuan audit secara signifikan dipengaruhi oleh karakteristik daerah, karakteristik kepala daerah, serta kinerja keuangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mengurangi temuan audit, pemerintah daerah perlu menciptakan sistem pengendalian internal yang kuat dan terintegrasi. Hal ini membutuhkan penerapan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang jelas serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk membantu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip pengendalian yang sesuai.

Kata kunci: karakteristik daerah, karakteristik kepala daerah, kinerja keuangan, pengendalian, temuan audit

Diterima Redaksi : 28-11-2024 | Selesai Revisi : 03-12-2024 | Diterbitkan Online : 05-12-2024

1. Pendahuluan

Kinerja keuangan pemerintah daerah ialah aspek krusial yang bisa menunjukkan seberapa baik suatu daerah mengelola sumber daya yang dimiliki dan melayani masyarakat dalam rangka otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan bahwasanya "Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan proses mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan keuangan daerah". Untuk mencapai tujuannya, pengelolaan keuangan yang

dilandasi oleh konsep akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, serta ekonomi harus diterapkan. Menurut Mardiasmo (2021), optimalisasi kinerja pemerintah, pengambilan keputusan yang tepat serta alokasi sumber daya yang efisien, serta pencapaian akuntabilitas publik dan perkembangan komunikasi kelembagaan merupakan tiga tujuan utama dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja diperlukan sebagai sarana akuntabilitas, karena dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di masa depan berdasarkan penilaian kinerja saat ini. Namun, Shara Ningsih et al. (2023) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal yang menyampaikan kemampuan kepada pemerintah daerah guna mengelola kelebihan sumber

daya daerahnya justru menciptakan ruang tambahan untuk melakukan penyalahgunaan anggaran. Hal ini memprihatinkan karena mayoritas praktik penyalahgunaan anggaran di daerah justru dilakukan oleh para pemimpin daerah dan pihak-pihak yang telah dipilih oleh rakyat untuk melayani kepentingan masyarakat (Sommaliagustina, 2019). Dalam tingkat daerah, kepala daerah dianggap sebagai pemimpin tertinggi sehingga kepala daerah memainkan peranan penting dalam menjamin efisiensi pengelolaan keuangan daerah, yang diwajibkan untuk melaporkan, mengungkapkan, dan menunjukkan semua operasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penindakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat 111 kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah antara tahun 2017 hingga September 2024 (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024). Di antara sekian banyak kasus korupsi yang ada, terdapat kasus dugaan penyimpangan pembelian alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Ampana pada tahun anggaran 2017 yang menyeret Bupati Kabupaten Tojo Una-Una. Menurut laporan tersebut, alat kesehatan senilai Rp 13 miliar dan alat kedokteran gigi dan laboratorium senilai Rp 8 miliar tidak terealisasi, mengakibatkan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 12 miliar. Selain itu, dilaporkan pula dugaan gratifikasi senilai Rp 2,4 miliar. Kemudian, mantan Bupati Banggai Laut menerima denda Rp 200 juta serta hukuman 4,5 tahun penjara karena menerima suap Rp 2,2 miliar dari beberapa pengusaha sehubungan dengan pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Banggai Laut tahun anggaran 2020. Selanjutnya, Kepala Desa Lembantongoa, Kabupaten Sigi, dituduh menyalahgunakan atau melakukan korupsi Dana Desa (ADD/DD) sebesar Rp 191.363.000 pada tahun 2023.

Fenomena-fenomena di atas menunjukkan kompleksitas dan sifat multifaset dari masalah akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Temuan-temuan dari hasil pemeriksaan sering kali menunjukkan adanya pelanggaran hukum dan kelemahan dalam kerangka pengendalian internal. BPK mencatat bahwa masalah ini dapat mengakibatkan kerugian daerah, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan, serta kekurangan penerimaan daerah (Nurfaidah & Novita, 2022). Untuk menciptakan metode intervensi yang efektif dan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, sangat penting untuk memahami elemen-elemen yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah.

Ada banyak penelitian yang dilakukan mengenai elemen-elemen yang mempengaruhi kinerja keuangan. Menurut Pahlevi (2017) pemimpin daerah yang berjenis kelamin perempuan, lebih tua, dan lebih lama menjabat dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Yusnita Mahardini & Setiawan (2022) menyoroti bahwa pemimpin daerah dengan tingkatan pendidikan serta latar belakang yang lebih

baik akan mempunyai kualitas kepemimpinan yang lebih optimal. Hasil ini konsisten dengan *Upper Echelon Theory* yang dibawa Hambrick & Mason (1984) yang mengatakan bahwasanya “sifat dan latar belakang manajerial seperti usia, pendidikan, dan pengalaman kerja sering digunakan sebagai penanda filter kognitif di tingkat eksekutif puncak yang memengaruhi kinerja organisasi dan pengambilan keputusan.”

Beberapa penelitian juga telah menyelidiki hubungan antara karakteristik daerah dan kinerja keuangan. Diantaranya, Nuraheni & Adi (2020) menemukan bahwa “tingkat kekayaan daerah, ukuran pemerintah daerah, leverage, dan pendapatan pajak daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah.” Sementara Sania et al., (2024) menyatakan bahwa “PAD memberikan *multiplier effect* terhadap pembangunan, karena pemerintah daerah memiliki fleksibilitas dalam menggunakan PAD. Secara empiris menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah sangat ditentukan oleh pendapatan daerahnya.” Teori rasional pilihan menyatakan bahwa ada kecenderungan individu untuk memaksimalkan utilitas yang meningkatkan keuntungan. Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan daerah yang melimpah, ukuran daerah yang besar, pinjaman daerah yang besar, dan pendapatan pajak yang signifikan akan mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan kegiatan operasional dan pelayanan dalam rangka meningkatkan kinerjanya. Namun, Noviyanti & Kiswanto (2016) menemukan bahwasanya “ukuran pemerintah daerah dan tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Ia menemukan bahwa tingkat ketergantungan pada belanja pusat dan daerah memiliki efek menguntungkan pada keberhasilan keuangan.” Perbedaan hasil penelitian ini boleh jadi akan berdampak terhadap temuan audit dari yang merefleksikan kinerja keuangan pemerintah.

Agency theory menyoroti konflik kepentingan antara dua pihak akibat tujuan yang berbeda (Michael C. Jensen, Meckling, 1976). Di pemerintahan, potensi konflik kepentingan sering kali tercermin dalam temuan audit. Ditasari & Sudrajat (2020) menemukan bahwa hasil audit memiliki dampak positif yang cukup signifikan pada kinerja pemerintah daerah. Sebaliknya, Tama & Adi (2018) menemukan bahwasanya temuan audit tidak mempunyai dampak yang substansial pada kinerja pemerintah. Terlepas dari konflik kepentingan *stakeholder*, orientasi pemerintah adalah pelayanan publik. Sebagaimana yang dikemukakan dalam *New Public Management Theory* yang menempatkan prioritas tinggi pada pencapaian hasil atau kinerja (D. Mardiasmo, 2002). Perubahan dari orientasi anggaran berbasis konvensional menjadi struktur anggaran yang berorientasi pada kinerja merupakan salah satu efeknya (Syafitri et al., 2020). Terlepas dari jenis sektornya, teori ini menekankan betapa pentingnya mengukur kinerja termasuk kinerja keuangan yang sering kali terealisasi dalam hasil audit.

Penelitian sebelumnya telah banyak meneliti dampak dari sifat-sifat kepemimpinan, variabel regional, serta temuan audit pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, kajian empiris mengenai interaksi timbal balik antara ketiganya masih sangat terbatas. Penelitian ini berusaha untuk menentukan dampak dari karakteristik kepala daerah, karakteristik daerah, dan kinerja keuangan terhadap temuan audit. Penelitian ini secara khusus akan melihat apakah kualitas kepala daerah dan karakteristik daerah mempengaruhi temuan audit, serta apakah kinerja keuangan yang lebih baik dapat meminimalkan temuan audit.

2. Metode Penelitian

2.1 Pengumpulan Data

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) serta neraca dari seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah untuk periode 2018-2023, mencakup lima tahun masa jabatan masing-masing kepala daerah. Selain itu, data terkait temuan audit dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) turut dianalisis. Semua data ini dikumpulkan langsung dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Tengah, menghasilkan 55 observasi. Adapun data mengenai karakteristik kepala daerah, yang mencakup bupati/wali kota, wakil bupati/wali kota, dan sekretaris daerah, diperoleh dari situs resmi pemerintah daerah serta sumber informasi lainnya.

Tabel 1. Daftar Pemerintah daerah Di Sulawesi Tengah

Kabupaten/Kota	Tahun Analisis
Banggai	2021-2023
Banggai Kepulauan	2020-2022
Banggai Laut	2021-2023
Buol	2018-2022
Donggala	2019-2023
Morowali	2018-2023
Morowali Utara	2021-2023
Parigi Moutong	2018-2023
Poso	2021-2023
Sigi	2018-2023
Tojo Una-Una	2018-2023
Tolitoli	2021-2023
Kota Palu	2021-2023

Sumber : Data Diolah (2024)

Karakteristik kepala daerah diartikan sebagai tanda khusus yang memiliki kesesuaian ciri, sifat khas tertentu, serta terdapat perbedaan antara satu dengan yang lainnya (Bunadi et al., 2022). Dalam penelitian ini digunakan indikator tingkat pendidikan dengan nilai yaitu: 1 untuk SMA serta STM, 2 untuk S1 serta akademi militer, 3 untuk S2, serta 4 untuk S3. Menurut Harumiati & Payamta (2014), karakteristik daerah yang berbeda antar daerah diasumsikan dapat mempengaruhi kinerja penyelenggara pemerintah daerah, pada studi ini diproyeksikan dengan ukuran pemerintah (Log^{10} aset daerah) serta tingkatan kekayaan daerah (PAD/total pendapatan daerah). Kinerja keuangan pemerintah adalah ukuran seberapa efektif dan efisien pemerintah memanfaatkan sumber daya keuangan yang ada guna menggapai tujuannya, yang diukur dengan memakai konsep *value for money* dengan rasio efisiensi, ekonomis, serta efektivitas (M. B. A. Mardiasmo, 2021). Temuan audit merupakan penyimpangan yang terjadi akibat ketidaktaatan pada regulasi serta pengendalian internal (Ruselvi et al., 2020), yang dalam penelitian ini diukur dalam satuan rupiah.

2.2 Pengukuran

Analisis dilaksanakan dengan menerapkan *Structural Equation Modeling-Partial Least Squares* (SEM PLS), yang ialah upaya analisis yang kuat dikarenakan dapat dipergunakan pada seluruh skala data, tidak memerlukan banyak asumsi, serta tidak membutuhkan jumlah sampel yang banyak. Selain guna mengkonfirmasi teori, metode ini bisa diterapkan guna membuat ikatan yang tidak memiliki dasar teori atau untuk menguji proporsi (Zulkarnain, 2020). Pengujian SEM PLS melibatkan analisis inner model dan pengujian hipotesis. Analisis inner model terdiri dari pengujian koefisien jalur, kecocokan model, serta R². Uji kecocokan model mencakup tiga indeks uji: “koefisien jalur rata-rata (APC), rata-rata *R-Square* (ARS), dan faktor varians rata-rata (AVIF). APC serta ARS dapat diterima jika perolehan p-value <0,05, sedangkan AVIF lebih kecil dari 5. Mengevaluasi nilai R², yang mengindikasikan seberapa besar variabilitas dalam faktor endogen yang dapat dijelaskan oleh variabel eksternal. Nilai koefisien determinasi (*R-squared*) sebesar 0.67, 0.33, dan 0.19 untuk setiap variabel laten endogen dalam model struktural masing-masing menunjukkan hubungan yang kuat, moderat, dan lemah” (Sarstedt et al., 2021).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Uji Model Struktural

Pengujian model internal merupakan model struktural yang dipakai guna memprediksi korelasi kausal dengan variabel laten. Terdapat tiga metode evaluasi struktural (model internal): penilaian koefisien jalur, kecocokan model, serta pengujian R². *R-Square* merupakan ukuran statistik yang menunjukkan seberapa efektif model dalam menjelaskan variasi dari *variable dependent*. Angka *R-Square* mencerminkan seberapa

besar perubahan variabel yang diprediksi (variabel dependen) dapat dijelaskan oleh faktor-faktor prediktor (variabel independen) (Hair et al., 2010).

R-Square adalah suatu ukuran statistik yang menunjukkan seberapa baik sebuah model dapat mendeskripsikan fluktuasi *variable dependent*. Sebagaimana data dalam tabel 1, perolehan *R-Square* senilai 0,257 mengindikasikan bahwasanya karakteristik kepala daerah (X1), karakteristik daerah (X2), dan kinerja keuangan (X3) menjelaskan 25,7% variabilitas variabel hasil audit. Sedangkan 74,3% dipengaruhi oleh faktor lain.

Tabel 2. Nilai R-Square

	R-Square
Temuan Audit (Y)	0.257

Sumber: Data olahan WarpPLS 7.0 (2024)

Untuk menilai signifikansi prediksi, nilai *Q-Square* harus lebih dari 0, sedangkan angka yang kurang dari nol mengindikasikan bahwa model penelitian tidak relevan (Sarstedt et al., 2021). Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai relevansi prediktif adalah 0,261, yang mengindikasikan bahwasanta model yang dipakai pada studi ini relevan.

Tabel 3. Nilai Q-Square

	Q-Square
Temuan Audit (Y)	0.261

Sumber : Data Olahan WarpPLS (2024)

Pengujian kecocokan model menghasilkan indeks koefisien jalur rata-rata (APC) senilai 0,322, dengan perolehan p-value senilai 0,002, <0,05. *Indeks R-Squared (ARS)* rata-rata adalah 0,257, dan perolehan p-value ialah 0,010, <0,05. Nilai AVIF: 1,052 <= 3,3. Temuan pengujian tersebut menunjukkan bahwa syarat uji kecocokan model dalam penelitian ini terpenuhi, sehingga inner model dapat diterima.

Tabel 4. Kesesuaian Model (Modal Fit)

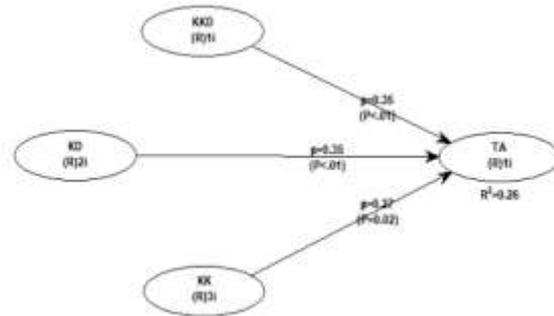
Indeks	Nilai Rujukan	Nilai Pengujian	Keterangan
Average path coefficient (APC)	P<0.05	P=0.002	Terpenuhi
Average R-Squared (ARS)	P<0.05	P=0.010	Terpenuhi
Average Adjusted R-Squared (AARS)	P<0.05	P=0.023	Terpenuhi
Average Block VIF (AVIF)	Acceptabel if <= 5 ideally <= 3.3	1.052	Diterima

Average Full Collinearity VIF (AFVIF)	Acceptabel if <= 5 ideally <= 3.3	1.129	Diterima
---------------------------------------	-----------------------------------	-------	----------

Sumber: Data Olahan WarpPLS (2024)

3.2 Uji Hipotesis

Dalam analisis SEM-PLS, pengujian hipotesis dilaksanakan dengan menerapkan uji-t, serta keputusan diambil berdasarkan uji-t. Perolehan p-value < 0,05 mengindikasikan signifikansi statistik. perolehan uji p-value dapat diamati dalam tabel 4.



Gambar 1. Hasil Uji Hipotesis

Keterangan:

KKD = Karakteristik Kepala Daerah

KD = Karakteristik Daerah

KK = Kinerja Keuangan

TA = Temuan Audit

Sumber: Data Olahan WarpPLS (2024)

Tabel 5. Hasil P-Value dan Uji Hipotesis

Pengaruh variabel	Koefisien Jalur	P-value	Signifikansi
Average path coefficient (APC)	0.351	0.002	Terpenuhi
Average R-Squared (ARS)	0.349	0.002	Terpenuhi
Average Adjusted R-Squared (AARS)	0.266	0.017	Terpenuhi

Sumber : Data Diolah WarpPLS (2024)

Pengujian variabel karakteristik kepala daerah terhadap temuan audit menghasilkan koefisien jalur senilai 0,351 serta perolehan p-value senilai 0,00 < 0,05, mendukung H1. Hal ini mengimplikasikan bahwasanya temuan audit dipengaruhi secara positif oleh karakteristik kepala daerah. Hal ini sesuai dengan *Upper Echelons Theory*, yang menjelaskan bagaimana tingkat pendidikan manajerial dapat mempengaruhi bagaimana keputusan dibuat. Temuan studi ini konsisten dengan temuan Angelina (2024) yang juga mengindikasikan bahwasanya tingkatan pendidikan kepala daerah memengaruhi kinerja pemerintah daerah. Kepala daerah yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih baik lebih mungkin untuk memahami prinsip-prinsip

manajemen keuangan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengontrol pengelolaan keuangan daerah dengan lebih baik, meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan atau penyimpangan, dan pada akhirnya mengurangi jumlah hasil audit. Kepribadian dan kualitas kepemimpinan seseorang juga dibentuk oleh pendidikannya. Kepemimpinan yang kuat dapat menumbuhkan budaya perusahaan yang menghargai integritas dan akuntabilitas.

Hasil pengujian untuk pengaruh karakteristik daerah terhadap temuan audit memperoleh nilai t sebesar 0.349 dengan p -value $0.00 < 0.05$, yang mengindikasikan bahwasanya H₂ dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik daerah memiliki dampak yang menguntungkan terhadap hasil audit. Hasil ini mendukung teori rasional pilihan, yang menyatakan bahwa individu memilih keputusan berdasarkan pertimbangan rasional untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Penelitian ini konsisten dengan penelitian Mustikarani & Fitriyani (2014). Ukuran pemerintah yang kuat, yang didefinisikan dengan aset yang besar dan pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan, memungkinkan daerah untuk melakukan keleluasaan yang lebih besar dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan. Aset yang besar memungkinkan daerah untuk menginvestasikan modal dalam berbagai infrastruktur dan inisiatif pembangunan, sehingga dapat meningkatkan perekonomian mereka. Sementara itu, PAD yang tinggi menunjukkan bahwa daerah dapat mengelola sumber daya lokal secara efektif, sehingga meminimalkan ketergantungan pada pemerintah pusat. Kemandirian fiskal ini akan mendorong daerah untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola keuangan sehingga berdampak pada penurunan risiko temuan audit.

Pengujian kinerja keuangan terhadap temuan audit menghasilkan skor 0,266 serta perolehan $p < 0,01 < 0,05$, yang mengindikasikan bahwasanya H₃ diterima. Berdasarkan hal ini, kinerja keuangan memengaruhi hasil audit berdasarkan rasio ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Akan tetapi, penelitian ini menemukan bahwa rasio efektivitas memiliki nilai faktor pemuatan sebesar $-0,073 < 0,5$. Hal ini menunjukkan adanya disparitas antara realisasi pendapatan dan anggaran pendapatan. Temuan ini sejalan dengan prinsip *New Public Management Theory* yang memprioritaskan pengukuran kinerja, termasuk kinerja keuangan. Secara keseluruhan, hasil pengujian ini sejalan dengan temuan Nuha (2022) yang mengatakan bahwasanya adanya peningkatan kinerja anggaran yang disebabkan oleh akuntabilitas dan transparansi yang lebih baik, tentunya ini akan berdampak pada penurunan jumlah temuan audit. Sementara Tao (2024) juga menemukan bahwa pengendalian internal yang kuat berkorelasi dengan kinerja yang lebih baik, sementara temuan audit dihambat oleh kinerja keuangan yang kuat. Dengan kata lain, manajemen cenderung tidak melakukan

penyimpangan dan kemungkinan temuan audit berkurang ketika kinerja keuangan lebih tinggi. Pemerintah dapat mengurangi risiko kesalahan atau penyimpangan pengelolaan keuangan dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang kuat, memiliki kapasitas fiskal yang memadai, akuntabel, dan memiliki sumber daya yang berkualitas. Hasilnya, jumlah temuan audit cenderung menurun, yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah menjadi lebih efektif.

Secara teoritis, penelitian ini mengimplikasikan bahwa para pemimpin daerah yang memiliki pengalaman atau pendidikan yang lebih baik biasanya mempunyai wawasan yang lebih mendalam mengenai tata kelola keuangan. Kapasitas para pemimpin daerah untuk mengelola aset dan pendapatan asli daerah (PAD) dengan cara memaksimalkan profitabilitas dengan tetap mempertimbangkan rasionalitas. Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal dapat meningkatkan kinerja anggaran. Semua faktor ini berkontribusi terhadap penurunan jumlah temuan audit, yang mengindikasikan bahwasanya pengelolaan keuangan pemerintah daerah semakin membaik.

Implikasi praktis dari studi ini mengindikasikan bahwasanya pemerintah daerah harus mendesain sistem pengendalian internal yang kuat dan kohesif untuk meminimalisir temuan audit. Hal ini memerlukan penerapan prosedur pengelolaan keuangan yang eksplisit dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia untuk membantu memahami dan menerapkan konsep pengendalian yang tepat. Peningkatan efektivitas dan keterbukaan pelaporan dapat diintegrasikan dengan teknologi informasi ke dalam sistem pengendalian internal. Untuk menjamin kepatuhan yang berlaku, pemerintah daerah juga harus menerapkan prosedur pemantauan dan penilaian rutin, seperti audit internal.

Meskipun penelitian ini berhasil menentukan hubungan antara kualitas kepala daerah, karakteristik daerah, dan indikator kinerja keuangan terhadap temuan audit, masih terdapat beberapa keterbatasan. Salah satunya adalah kesulitan dalam mendefinisikan dan mengkuantifikasi aset lainnya untuk menentukan ukuran pemerintah. Aset lainnya termasuk aset pemerintah daerah yang tidak tergolong sebagai dana cadangan, aset tetap, investasi jangka panjang, atau aset lancar (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2014). Termasuk di dalamnya aset lain-lain yang terkesan menambah total aset padahal aset tersebut tidak produktif atau tidak lagi dapat digunakan. Sebagai contoh, pada tahun anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Sigi mencatatkan aset lain-lain sebesar 14% dari total aset (Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah, 2022). Hal ini tentu saja memberikan kesan yang ambigu mengenai status aset saat ini. Akibatnya, keputusan kebijakan yang didasarkan pada

data aset yang tidak akurat dapat memberikan pengaruh negatif terhadap pembangunan daerah.

mendalam pada karakteristik kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), selain itu disarankan untuk memperluas variabel penelitian dengan memasukkan lebih banyak aspek internal dan eksternal. Peneliti dapat memperhitungkan elemen-elemen selain keuangan, seperti kualitas SDM, struktur organisasi, budaya organisasi, serta undang-undang pemerintah. Dengan demikian, analisisnya akan lebih menyeluruh. Mengingat keterbatasan penelitian ini, penelitian selanjutnya dapat mendefinisikan ukuran pemerintah secara lebih eksplisit berdasarkan jenis aset, sehingga dapat memperoleh hasil analisis yang lebih akurat dan mengidentifikasi hubungan yang lebih spesifik antara ukuran pemerintah dan temuan audit.

Selanjutnya, pemerintah daerah dapat memperkuat kemampuan sumber daya manusia, mengelola aset daerah secara efektif, dan memastikan pemeliharaan dan pemanfaatan yang optimal. Selain itu, kerja sama yang efektif dengan BPK dan tindak lanjut yang cepat atas hasil audit sangat penting untuk menghindari kesalahan yang berulang.

4. Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan dari perolehan investigasi, bisa menyimpulkan bahwasanya ciri-ciri kepala daerah, karakteristik daerah, dan keberhasilan keuangan mempunyai dampak yang menguntungkan pada temuan audit. Hal ini mengindikasikan bahwasanya tingkat pendidikan yang tinggi memberikan kemampuan kepada para pemimpin daerah untuk menilai data dan informasi secara kritis, mengembangkan strategi yang lebih matang dan terorganisir, mengenali potensi risiko audit, dan membuat penilaian yang lebih tepat. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa daerah dengan aset yang signifikan dan PAD yang besar mempunyai kapabilitas yang lebih tinggi guna menjalankan fungsi pemerintahan dengan sukses dan efisien. Hal ini memungkinkan daerah untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperketat pengendalian internal. Akibatnya, temuan audit dapat ditekan. Kemudian, kinerja keuangan yang solid sangat mengurangi jumlah temuan audit. Daerah dengan kinerja keuangan yang baik, yang terlihat dari pengelolaan anggaran yang efektif, sistem pengendalian internal yang kuat, dan transparansi yang tinggi, memiliki kemungkinan temuan audit yang lebih rendah.

Peneliti selanjutnya dapat mengeksplorasi secara mendalam pada karakteristik kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), selain itu disarankan untuk memperluas variabel penelitian dengan memasukkan lebih banyak aspek internal dan eksternal. Peneliti dapat memperhitungkan elemen-elemen selain keuangan, seperti kualitas SDM, struktur organisasi, budaya organisasi, serta undang-undang pemerintah.

Dengan demikian, analisisnya akan lebih menyeluruh. Mengingat keterbatasan penelitian ini, penelitian selanjutnya dapat mendefinisikan ukuran pemerintah secara lebih eksplisit berdasarkan jenis aset, sehingga dapat memperoleh hasil analisis yang lebih akurat dan mengidentifikasi hubungan yang lebih spesifik antara ukuran pemerintah dan temuan audit.

Selanjutnya, pemerintah daerah dapat memperkuat kemampuan sumber daya manusia, mengelola aset daerah secara efektif, dan memastikan pemeliharaan dan pemanfaatan yang optimal. Selain itu, kerja sama yang efektif dengan BPK dan tindak lanjut yang cepat atas hasil audit sangat penting untuk menghindari kesalahan yang berulang.

Daftar Rujukan

- Angelina, J., Saerang, D. P. E., & Warongan, J. D. L. (2024). The influence of audit opinion, characteristics of regional head, and levels of corruption on performance of local government in Indonesia. *The Contrarian: Finance, Accounting, and Business Research*, 3(2), 96–112. <https://doi.org/10.58784/cfabr.160>
- Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah. (2022). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2021*.
- Buchanan, J. M. (1962). *The calculus of consent (Vol. 3)*. University of Michigan Press.
- Bunadi, I., Saputro, D. D., & Nurmalasari, N. (2022). Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia. *Cakrawala Repositori IMWI*, 5(1), 101–111. <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v5i1.101>
- Ditasari, R. A., & Sudrajat, M. A. (2020). Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 4(2), 104. <https://doi.org/10.25273/inventory.v4i2.7668>
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). *Multivariate data analysis: Pearson College division. Person: London, UK*.
- Hambrick, D. C., & Mason, P. A. (1984). Upper echelons: The organization as a reflection of its top managers. *Academy of Management Review*, 9(2), 193–206.
- Harumiati, Y., & Payamta, P. (2014). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2011. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 3(2), 84. <https://doi.org/10.25273/jap.v3i2.1244>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). *Publikasi Data Statistik Penindakan*.

- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2014). Buletin Teknis SAP No. 2 Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah. In *Ksap*.
- Mardiasmo, D. (2002). Akuntabilitas Sektor Publik Yogyakarta. *Penerbit Andi Yogyakarta*.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi sektor publik-edisi terbaru*. Penerbit Andi.
- Michael C. Jensen, Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360. <https://doi.org/10.1057/9781137341280.0038>
- Noviyanti, N. A., & Kiswanto. (2016). Characteristics, Regional Influence, BPK Government, Performance Audit, On Government, Finance. *Accounting Analysis Journal*, 5(1), 1–10.
- Nugraheni, E., & Adi, P. H. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Meta-Analisis. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(1), 19–42. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i1.4398>
- Nuha, S. U. (2022). The Influence of Accountability and Transparency on Budget Performance With The Concept of Value For Money in The Lumajang District Government. *International Journal of Accounting and Management Research*, 3(2), 28–36.
- Nurfaidah, N., & Novita, N. (2022). Bagaimana Opini Audit, Temuan Audit Atas Kelemahan SPI Dan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Memengaruhi Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia? *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 259–269. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1529>
- Pahlevi, A. R., & Setiawan, D. (2017). Apakah Karakteristik Kepala Daerah Berdampak terhadap Kinerja Pemerintahan? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(3), 571–582.
- Ruselvi, S. A., Nurbaiti, A., & Aminah, W. (2020). PENGARUH AKUNTABILITAS, TEMUAN AUDIT DAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TERHADAP TINGKAT KORUPSI (Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2018). *EProceedings of Management*, 7(2).
- Sania, N., Yamin, N. Y., Paranoan, S., & Tanra, A. A. M. (2024). DAMPAK DANA TRANSFER DAN FLYPAPER EFFECT PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA SE-SULAWESI TENGAH. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 9(1), 247–261.
- Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Hair, J. F. (2021). Partial least squares structural equation modeling. In *Handbook of market research* (pp. 587–632). Springer.
- Shara Ningsih, K., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2023). Desentralisasi Fiskal Dalam Peyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7(3), 2606–2614. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5389/http>
- Sommaliagustina, D. (2019). Implementasi Otonomi Daerah dan Korupsi Kepala Daerah. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 44–58. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.290>
- Syafitri, R., Sudirman, S., & Sugianto, S. (2020). New Public Management Model as Rule Application of Performance-Based budget (ABK)(Empirical Study at SKPD of Sigi Regency). *3rd Global Conference on Business, Management, and Entrepreneurship (GCBME 2018)*, 83–87.
- Tama, I. G. M. A. A., & Adi, P. H. (2018). Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah, Ukuran Pemerintah, dan Temuan Audit terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Perspektif Akuntansi*, 1(1), 91–113.
- Tao, L. (2024). Regulatory Role of Financial Performance on Internal Control and Audit Costs: Evidence from China. *Advances in Economics, Management and Political Sciences*, 70(1), 225–230. <https://doi.org/10.54254/2754-1169/70/20231703>
- Yusnita Mahardini, N., & Setiawan, D. (2022). Do Characteristics And Political Background Of Regional Heads Influence Financial Performance Of Local Governments In Indonesia? *International Journal of Science, Technology & Management*, 3(4), 845–855. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v3i4.555>
- Zulkarnain. (2020). PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN PENGENDALIAN AKUNTANSI TERHADAP KINERJA MANAJERIAL DENGAN KOMITMEN ORGANISASIONAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris Pada Aparatur Negara Pengadilan Tinggi Pontianak). *Jurnal Maksi Untan*, 5(1), 1–37.